

**MENGHADIRKAN TONGGAK SEJARAH:
UPAYA PELESTARIAN SITUS CANDI PULAU SAWAH
DI KABUPATEN DHARMASRAYA***

Oleh

Dr. Nopriyasman, M.Hum

(Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas,

e-mail: nopriyasman@yahoo.com)

A. Pengantar

Bila menyebut nama Dharmasraya, ingatan kita tidak saja tertuju kepada Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tahun 2003 (Undang-Undang No. 38 tahun 2003), tetapi juga terarah kepada suatu masa ketika dinamika hidup “beraja” dipraktikkan di kawasan rantau bagian selatan Minangkabau, Sumatera Barat. Representasi suasana hidup berkerajaan tersebut sedikit banyaknya tetap terasa hingga dewasa ini, dan realitanya dapat dibuktikan melalui berbagai peninggalan sejarah, baik yang bersifat fisik material dan dapat diraba (*tangible*), misalnya karya manusia peninggalan sejarah dan purbakala atau benda cagar budaya, maupun yang tidak dapat diraba (*intangible*), seperti seni musik, sastra lisan, pembacaan sastra, wewangian, dan sebagainya.

Semua jenis tinggalan budaya tersebut tersebar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, khususnya bagian hulu sungai itu, seperti Rumah Gadang Pulau Punjung, Situs Bukik Brahalo, situs bekas Istana Kerajaan Siguntur, situs Candi Pulau Sawah, Rumah Gadang Siguntur, Mesjid Tua Siguntur, Makam Rajaraja Siguntur, Candi Bukik Awang Maombiak, situs Candi Padang Roco, situs Arca Bhairawa, dan situs Candi Padanglaweh. Dari berbagai peninggalan arkeologis tersebut, Candi Pulau Sawah mempunyai sebaran yang cukup luas, sebagaimana yang direkonstruksi oleh BPCB Batusangkar Sumatera Barat. Ada

*Makalah disampaikan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pelestarian (RIP) Situs Candi Pulau Sawah di Ruang Pertemuan Hotel Sakato Jaya, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 25 November 2019.

banyak tinggalan budaya di kawasan Situs Pulau Sawah, seperti candi, arca, keramik, dan artefak lainnya. Luas kawasan Pulau Sawah hampir mencapai 2 ha, dan dari 11 struktur bangunan bata yang ditemukan di sini, 3 diantaranya sudah dipastikan sebagai bangunan candi (Setiawan dan Utomo, 2006: 27).

Keberadaan situs Candi Pulau Sawah dan ragam tinggalan budaya di kawasan situs tersebut merupakan potensi daerah, namun juga sebagai tantangan dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah kabupaten memang telah merancang kawasan candi Candi Pulau Sawah sebagai salah satu daerah tujuan wisata, sebagaimana termaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurut RTRW Dharmasraya, warisan budaya yang ada mesti dipelihara dan dikembangkan sebagai potensi untuk pariwisata utama, tanpa mengabaikan ekosistem wilayah dan membangun berbagai infrastruktur yang mendukung bagi wilayah di sekitar lingkungan situs candi Pulau Sawah tersebut.

Dalam mendukung upaya pemerintah itu, maka potensi kawasan situs Candi Pulau Sawah memerlukan perlindungan, pelestarian, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Bagaimanakah upaya pelestarian Situs Candi Pulau Sawah tersebut sebagai tonggak sejarah Kabupaten Dharmasraya ? Persoalan ini kita coba diskusikan dalam FGD ini, sekaligus sebagai pemantik ide atau gagasan merumuskan Rencana Induk Pelestarian (RIP) situs Candi Pulau Sawah dan peninggalan-peninggalan budaya lainnya di Kabupaten Dharmasraya.

B. Sekilas tentang Kerajaan Dharmasraya

Kisah Kerajaan Melayu (Jambi) sudah dicatat sejarah sejak abad ke-7, misalnya pada berita-berita dari negeri Cina. Hal ini diperkuat oleh berbagai peninggalan arkeologis dan semakin terang dengan hadirnya Adityawarman di Sumatera bagian tengah pada abad ke-14. Kerajaan Melayu Dharmasraya dipercaya sebagai kelanjutan dari Kerajaan Melayu kuno Jambi. Keberartiannya berlangsung sejak abad ke-11, masa dimana Kerajaan Sriwijaya berada dalam kemerosotan, yang kemudian berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Melayu (Jambi). Menjelang akhir abad ke-13, sehubungan dengan adanya ekspedisi *pamalayu*

(1275) dari Raja Kertanegara, maka Kerajaan Melayu Dharmasraya berada dalam pengaruh kuasa Kerajaan Singasari. Atas hubungan baik yang terjadi, pada tahun 1286, Raja Kertanegara memberi hadiah Raja Dharmasraya, Shri Tribuana Mauliwarmadewa arca Amoghapasa lokeswara. Arca ini menjadi bukti awal pemakaian nama Dharmasraya yang ditemukan di Padang Roco. Nama Dharmasraya juga terdapat dalam sumber Jawa *Nagarakrtagama* dan dalam naskah *Pararaton* serta Kidung Panji Wijayakrama dalam kaitan *pamalayu* yang diperintahkan Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari (Zed, 2009: 9).

Pemberian hadiah tiruan arca Amoghapasa dari Candi Jayaghu (Candi Jago, Malang) merupakan bukti persahabatan antara Singasari dari Jawa dengan Melayu Dharmasraya (Suwarnabhumi) di Sumatera, sekaligus dimaksudkan untuk menahan gerak Kaisar Khubilai Khan, yang ingin meluaskan pengaruhnya di Sumatera. Sementara itu, dari Dharmasraya Raja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa mempersembahkan dua putrinya (Dara Petak dan Dara Jingga) untuk dikawini bangsawan Singasari (Raja Kertanegara) (Mansoer, et.al., 1970: 56-57). Adityawarman, yang kemudian menjadi raja di Kerajaan Melayu Dharmasraya (1347) adalah putra dari Dara Jingga (putri tanah Melayu) dan Rakyat Mahamantri Adwaya Brahmadewa (petinggi Singasari). Ketika Singasari sudah menjadi Kerajaan Majapahit, Dharmasraya menjadi bawahan dari Majapahit (Shar, 2010: 21; Mansoer, 1970: 57; Amran, 1981: 29; Muljana, 2008: 8).

Sejak tahun 1286, Dharmasraya merupakan pusat pemerintahan hingga tahun 1347, setelah itu Adityawarman memindahkan pusat kerajaan ke daerah Tanah Datar, Minangkabau. Selama jayanya, Rouffaer (Amran, 1981: 39) memastikan bahwa pusat Kerajaan Dharmasraya itu ada di daerah Sungai Langsek, Rambahan atau Siguntur. Pendapat Rouffaer ini didasari pada arca Amoghapasa di atas yang oleh penduduk dikenali sebagai Si Rocok. Kern menyebut bahwa Si Rocok itu adalah Adityawarman. Dalam konteks daerah ini merupakan pusat pemerintahan dan atau ibukota kerajaan, maka berbagai tempat pemujaan pun dibangun di kawasan sepanjang aliran sungai (Batanghari),

sekaligus sebagai tempat pendharmaan dalam rangka memuliakan raja, yang jejak-jejaknya masih terlihat nyata hingga dewasa ini.

Pembangunan Candi Pulau Sawah pada masa Hindu/Budha mempunyai hubungan erat dengan pembangunan candi-candi lainnya DAS Batanghari, dan memberi informasi bahwa telah terjadi evolusi pemukiman, pusat pemerintahan, dan kegiatan (ekonomi) pasar, dan pusat-pusat aktivitas keagamaan di daerah ini dahulunya. Candi-candi di sini sekaligus menjadi bukti sejarah, adanya keterhubungan daerah hulu sebagai penghasil emas dan pertanian dengan daerah hilir (Jambi) sebagai pelabuhan-pelabuhan dagang, termasuk hubungan kehidupan keagamaan. Ada banyak candi di sepanjang aliran Batanghari di bagian hilir, misalnya di daerah Muarajambi, Solok Sipin, Pematang Jering, Pematang Saung, Lubuk Ruso, dan Teluk Kual, yang berdiri pada abad ke-9 hingga abad ke 13 (Witrianto, 2014: 74). Salah satu faktor dibangunnya candi di kawasan sekitar pinggir sungai adalah pertimbangan kemudahan pengangkutan bahan-bahan material untuk pembangunan candi tersebut. Di samping itu, keberadaan bangunan suci di pinggir sungai juga untuk memudahkan ummat beribadah atau menyelenggarakan ritual keagamaan, dan para penziarah dengan mudah mendapatkan air terkait ritual keagamaannya (Asnan, 2016: 95). .

Ketika Muarajambi semakin tidak aman dari ancaman musuh politik, dan juga para Lanun, maka Dharmasraya muncul sebagai ibukota baru Kerajaan Melayu. Patung Amoghapasa yang ditemukan di Dharmasraya dapat dikatakan bukti, bahwa Kertanegara mengakui Dharmasraya sebagai ibukota baru dari Kerajaan Melayu. Dalam manuskrip Tanjung Tanah (Kozok, Uli. 2006) tergambar bahwa Dharmasraya pada waktu itu menjadi tempat pengaturan perdagangan dan juga kerjasama antara daerah seperti dengan Lembah Kerinci (yang punya deposit emas) hingga Palembang. Apalagi posisi Dharmasraya memang amat strategis, yaitu terletak pada jalur perdagangan dari dataran Tinggi Minangkabau hingga wilayah pesisir Jambi. Pada abad ke-14, ketika pusat Kerajaan Melayu telah berpindah ke dataran tinggi Minangkabau, maka sekurangnya ada tiga kota yang berperan penting, yaitu Saruaso (Kota di dataran tinggi Minangkabau), Dharmasraya (kawasan bagian tengah aliran sungai), dan Muarajambi (kawasan

muara sungai) dikenal sebagai pusat-pusat perdagangan yang menjadikan Sungai Batanghari sebagai jalur utama perdagangan mereka. Berbagai peninggalan seperti situs, bangunan sejarah, dan peninggalan artefak yang tersebar di sini, khususnya di kabupaten Dharmasraya saat ini adalah bukti yang tidak terbantahkan, bahwa masyarakat daerah ini pernah menganut agama Hindu/Budha.

Pada abad berikutnya, terutama setelah masuk dan berkembangnya Islam (abad ke-16) di kawasan Dharmasraya muncul kerajaan-kerajaan kecil yang bersifat kedatuan, seperti Kerajaan Pulau Punjung (dikenal juga sebagai *camin taruih* Kerajaan Pagaruyung dengan rajanya bergelar “Tuanku Sati”); Kerajaan Koto Besar (rajanya bergelar “Daulat Sultan Besar Sri Maharajadiraja” dengan panggilan Tuanku Kerajaan); Kerajaan Siguntur (rajanya bergelar Tuanku Bagindo Ratu); Kerajaan Sitiung (rajanya bergelar Tuanku Rajo Hitam); dan Kerajaan Padang Laweh (rajanya bergelar Tuanku Bagindo Muhammad).

C. Upaya Pelestarian Situs Candi Pulau Sawah Era Kontemporer

Salah satu bentuk warisan budaya (*cultural heritage*) yang mendapat perhatian luas pemerintah adalah candi Pulau sawah. Kawasan situs Candi Pulau sawah menjadi salah satu identitas yang hadir dalam sejarah Dharmasraya, sekaligus sebagai modal dasar dalam menumbuhkan budaya nasional. Oleh sebab itu, pemerintah bersama BPCB Sumatera Barat mengupayakan agar program pelestarian benda-benda peninggalan budaya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu pengelolaan sumber daya budaya yang terdapat di Dharmasraya sedapatnya diarahkan para peran serta dan tanggung jawab masyarakat (*community based management*).

Keterlibatan masyarakat dalam menginterpretasikan, memelihara, dan mengelola sumber daya budaya, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan politik, dan kapan perlu juga pengusaha dalam bidang ekonomi. Perlu dibangun kerjasama dari tiga pilar itu (pemerintah, pengusaha, dan masyarakat), apalagi bila dikaitkan dengan pengembangan Situs Candi Pulau Sawah dan sekitarnya bagi destinasi wisata di Kabupaten

Dharmasraya. Situs candi Pulau Sawah merupakan sumber daya budaya yang penting bagi sejarah, arsitektur, dan kebudayaan. Ada banyak kreasi, imajinasi, ekspresi, dan informasi yang bisa digali dari kompleks candi tersebut, yang berguna bagi pembelajaran generasi bangsa.

Menurut Lipe (1984: 4), setiap benda-benda peninggalan budaya tersebut memuat makna asosiasi, informasi, estetika, dan ekonomi. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap sumber daya budaya tersebut tidak bisa tidak harus sama dan seimbang dengan perlakuan terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia dan binaannya. Secara asosiatif, maka pelestarian Situs Candi Pulau Sawah adalah bukti adanya relasi antara masa kini dan masa lalu. Candi Pulau Sawah merupakan simbol yang dapat membantu pengetahuan sejarah, khususnya masyarakat Dharmasraya dalam melihat karya anak bangsa yang membanggakan. Candi Pulau Sawah dapat menjadi identitas dan jati diri bangsa, sebab ternyata keberadaannya terkait langsung dengan pembangunan candi-candi lainnya di nusantara, khususnya di daerah sepanjang DAS Batanghari. Dalam konteks ini, pelestarian Situs Candi Pulau Sawah sekaligus menjadi simbol perekat budaya suku-suku bangsa di Indonesia.

Begitu juga muatan informasi dari kawasan Situs Candi Pulau Sawah berupa asal usul, cara-cara pembuatan, arsitekturnya, fungsi, teknologi, dan keindahannya memperlihatkan alam pikir (imajinasi) anak negeri ini. Beberapa informasi memperlihatkan pula realita kehidupan beragama, dan ekspresi kepercayaan yang dianut anak negeri yang didasari pada ajaran Budha. Beberapa tata cara ritual keagamaan hingga kini, khususnya di Kabupaten Dharmasraya, disinyalir banyak mengakomodasi dari pernahnya agama Hindu/Budha menjadi anutan kepercayaan masyarakat.

Makna lainnya yang dihadirkan oleh Candi Pulau Sawah adalah nilai estetika (keindahan), berupa bentuk, jenis, dan teknik pengerjaannya. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, dan juga wisatawan yang berkunjung ke sini untuk mengetahui lebih dalam tentang Candi Pulau sawah. Tidak kalah pentingnya adalah kawasan situs Candi Pulau Sawah mempunyai nilai ekonomi. Hal ini terkait kepada realitas bahwa candi dan berbagai

peninggalan sejarah dan budaya lainnya mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik lokal (domestik) maupun mancanegara (internasional), sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomis dan wisatawan mendapat kepuasan. Dalam konteks ini, pelestarian Candi Pulau Sawah dapat menjadi penyumbang devisa negara, sekaligus menjadi peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Dewasa ini, Kabupaten Dharmasraya giat membangun di segala bidang. Dalam pelaksanaan pembangunan itu, ada kalanya berinteraksi dengan benda warisan budaya, sehingga bila tidak terencana dengan baik dikawatirkan kelestarian kawasan sumber daya budaya tidak dapat dipertahankan sebagaimana mestinya. Pengembangan objek pariwisata budaya oleh pemerintah, seperti penataan komplek Candi Pulau Sawah, dan peninggalan sejarah dan budaya lainnya dapat menimbulkan ancaman bagi tinggalan budaya yang bersangkutan. Atas dasar itulah, maka pengelolaan tinggalan budaya, khususnya kawasan Candi Pulau Sawah mesti dilakukan secara terpadu, mulai dari pemerintah, para ahli, dan masyarakat. Diharapkan nanti, pemanfaatan tinggalan budaya tidak boleh melupakan daya dukung lingkungan, keberlanjutannya, dan tidak kalah pentingnya masyarakat dapat pula mengambil manfaat dari modal budaya (*cultural capital*) dalam pengembangan pariwisata budaya (Ardike, 2007: 36)

Sekurangnya ada pembagian tugas yang jelas dalam upaya pemahaman dan pelestarian warisan budaya. Pemerintah sesuai dengan kekuatan dan kewenangannya melakukan pengaturan dan mengkoordinasikan berbagai komponen yang ada. Masyarakat menerima informasi, mempunyai kekuatan ekonomi dan juga pendanaan dalam upaya pelestarian tinggalan budaya miliknya. Sementara, ahli sejarah dan arkeologi secara terus menerus berupaya memberikan penjelasan yang menyangkut nilai dan makna warisan budaya kepada pemerintah dan masyarakat. Hadirnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang tinggalan budaya, khususnya Situs Candi Pulau Sawah, membantu mereka mengenali asal usul dan jati diri. Lebih jauh dapat menjadi modal lahirnya penghargaan sesama anak bangsa dalam kerangka persatuan dan kesatuan.

Dengan demikian, berbagai kegiatan berupa promosi dan penyediaan informasi mengenai sejarah candi dan peninggalan arkeologi diharapkan berjalan

secara berkesinambungan. Dijadikannya kawasan Candi Pulau sawah sebagai objek wisata, di satu sisi menguntungkan karena muncul upaya pelestarian terhadap situs dan peninggalan purbakala itu, yaitu pemugaran, pengamanan, pemeliharaan, kebersihan lingkungan, dan penjagaan kesucian. Sebaliknya, bisa saja terjadi pencemaran lingkungan, rusaknya situs, dan rusak atau hilangnya benda-benda purbakala tersebut. Untuk sisi negatif ini, perlu diantisipasi sedini mungkin.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya pelestarian Situs Candi Pulau Sawah. *Pertama*, pemeliharaan dan pelestarian kawasan candi mesti dilakukan secara rutin dan berkesinambungan oleh masyarakat setempat atau pemilik lahan tempat candi itu berada. Keterlibatan masyarakat dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawabnya dalam memelihara tinggalan budaya sebagai objek wisata. *Kedua*, upaya komersialisasi kawasan Situs Candi Pulau Sawah mestilah diiringi dengan penyediaan informasi yang memadai tentang sejarah dan fungsi bangunan yang ada dalam kompleks candi itu. Hal ini berarti perlu ada penelitian sejarah candi secara komprehensif. *Ketiga*, pengelolaan kawasan situs Candi Pulau Sawah bisa juga dilakukan dengan pola kemitraan antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Tentu saja dengan supervisi dan mitra kerja pemerintah kabupaten, khususnya Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Batusangkar, Sumatera Barat. *Keempat*, daya dukung lingkungan fisik dan perlindungan fisik candi perlu diperhatikan, terutama dalam kaitan pemanfaatan situs dan tinggalan arkeologi di kawasan Candi Pulau sawah sebagai objek atau daya tarik wisata.

D. Penutup

Peninggalan sejarah Kerajaan Melayu Dharmasraya yang tersebar di daerah sepanjang DAS Batanghari memperlihatkan bahwa daerah ini pernah besar dan ramai dikunjungi, baik karena terkait aktivitas perdagangan, maupun dalam kaitan hubungan keagamaan. Berbagai peninggalan berupa candi, arca, keramik, dan lain-lain perlu dilestarikan, apalagi ketika masyarakat telah menjadikan Islam

sebagai agamanya, maka ada perilaku masyarakat yang menghancurkan sebagian besar benda peninggalan Hindu/Budha itu. Hartanto dan Gabriel pernah melaporkan, bahwa berbagai peninggalan sejarah dan budaya itu juga terabaikan, bahkan ada yang hilang dan dijual masyarakat akibat ketidaktahuannya akan keberartian dari benda peninggalan masa lalu Dharmasraya itu (Padang Ekspres, 17 Februari 2008).

Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Candi Pulau Sawah diharapkan mampu mengeliminir segala tindak perbuatan yang bersifat menghancurkan benda-benda purbakala tersebut, dan tentu saja langkah pedoman ke depan bagi pengembangan kawasan Situs Candi Pulau Sawah. Oleh sebab itu perencanaan pelestarian kawasan Situs Candi Pulau Sawah, sebagaimana yang dirumuskan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Teknis Penyusunan RIP Situs Candi Pulau Sawah BPCB Sumatera Barat didasari pada nilai dan makna kehadiran situs, keterkaitan dalam upaya pengembangan pariwisata, daya dukung kompleks candi, ketersediaan sarana dan prasarana, historisitas sosial budaya, dan aspek ekonomi. Kegiatan diskusi terpumpun ini dimaksudkan untuk menghimpun berbagai masukan yang bersifat konstruktif, bagaimana yang terbaik bagi pelestarian peninggalan sejarah dan budaya, terutama kawasan Situs Candi Pulau Sawah. Dengan demikian, makalah ini sesungguhnya hanyalah untuk pemantik ke arah diskusi yang positif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Rusli. 1981. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ardika, I Wayan. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar-Bali: Pustaka Larasan
- Asnan, Gusti. 2016. *Sungai dan Sejarah Sumatra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lipe, W.D. 1984. "Value and meaning in cultural resource", dalam Cleere, H. (Ed.) 1984. *Approaches to the Archaeological Heritage*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hartanto dan Gabril. 2008. "Sejarah Yang Dijarah", dalam *Padang Ekspres*. Padang: 17 Februari.
- Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Naskah Melayu Yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara-Yayasan Obor Indonesia.
- Mansoer, M.D., dkk. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bharatara.
- Muljana, Slamet. 2008. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LkiS.
- Pemkab Dharmasraya. 2019. *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021*. Pulau Punjung: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- Pemkab Dharmasraya. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031*. Pulau Punjung: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- Setiawan, Budi dan Utomo, Bambang Budi. 2006. *Menguak Tabir Dharmasraya*. Batusangkar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar.
- Shar, Ridjaluddin. 2010. *Maharaja Diraja Adityawarman Matahari di Khatulistiwa Sebuah Novel Historiografi Mengungkap Tambo Alam Minangkabau dan Kekuatan Penguasa Belahan Barat Imperium Majapahit*. Padang: Citra Budaya Indonesia.
- Witrianto. 2014. "Potensi Sejarah dan Purbakala DAS Batanghari", dalam *Analisis Sejarah*. Vol. 5. No.1. Padang: Labor Sejarah Universitas Andalas.
- Zed, Mestika. 2009). "Dharmasraya di Antara Kerajaan-Kerajaan Melayu Kuno di Sumatera", *Makalah* dalam Seminar nasional tentang Sejarah Dharmasraya (9 Desember 2009).

Dharmasraya, 25 November 2019
NP